

**PENGARUH RASIO KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh :  
**DWI RAHAYU NINGTYAS**  
NIM. 2008310526

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2013**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Rahayu Ningtyas  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Oktober 1989  
N.I.M : 2008310526  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : PENGARUH RASIO KINERJA KEUANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 21 Mei 2013

  
**Dr. Diah Ekaningtyas, Ak.,MM**

Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 21 Mei 2013

  
**Triana Mayasari, SE.,M.Si.,Ak**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Tanggal : 21 Mei 2013

  
**Supriyati SE,Ak.,M.Si.**

# **PENGARUH RASIO KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**Dwi Rahayu Ningtyas**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [2008310526@students.perbanas.ac.id](mailto:2008310526@students.perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34 -36 Surabaya

## **ABSTRACT**

*Performance assessment relating to the budget may include assessment using ratios between components in local government financial reports. The purpose of this study is to determine (whether or not) there is influence of the financial performance of local government to economic growth. The research methodology used is descriptive analysis method and statistical analysis methods. The data used are secondary data with local government financial reports in 2004-2011 that are used as the sample.*

*Hypothesis testing is performed using the F test and t test, with a significance level ( $\alpha$ ) of 5%. Data analysis using statistical data processing software SPSS 15:00 for windows. The regression analysis of this study showed that, 1) Degree of decentralization does not affect the economic growth in Banyuwangi in the period 2004-2011. 2) Financial dependence does not affect the economic growth in Banyuwangi in the period 2004-2011. 3) Independence ratio effects on economic growth in Banyuwangi in the period 2004-2011. 4) Effectiveness ratio effects on economic growth in Banyuwangi in the period 2004-2011.*

*Keywords: Degree of Decentralization, Financial Dependence, Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Economic Growth*

## **PENDAHULUAN**

Adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah

dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat luas. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap

pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150-158).

Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangannya karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintah dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada *out put* bukan lagi pada *in put*. Anggaran seperti ini menjadi konsep value for money yaitu ekonomis, efektif dan efisien sehingga kinerja pemerintah daerah lebih mudah diukur.

Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk memberikan arahan dan panduan berkaitan dengan rencana yang telah ditetapkan. Penilaian

kinerja ini diharapkan pemerintah daerah akan bekerja semakin baik, transparan dan akuntabel. Evaluasi kemampuan daerah dapat dengan menggunakan indikator masukan, keluaran, hasil dan dampak (UU No.32 Tahun 2004). Penilaian kinerja yang berkaitan dengan anggaran dapat berupa penilaian dengan menggunakan rasio-rasio antar komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Arus Kas).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah dengan judul penelitian “Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi”.

## **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Teori Desentralisasi Fiskal**

Pembagian urusan Pemerintahan di Indonesia diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 10 ayat (10) dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam pemerintahannya menjalankan otonomi otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak - pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

### **Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bachtiar arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

- a. Akuntabilitas, Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).
- b. Manajerial, Akuntansi Pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan

kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

- c. Pengawasan, Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

### **Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

### **Syarat Akuntansi Pemerintahan**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai

dengan karakteristik dan betujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan (A Manual Governmental Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut (dalam Bahctiar Arif dkk, 2002:9) :

- a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU dan Peraturan lain. Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya.
- b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.
- c. Perkiraan - perkiraan yang harus diselenggarakan. Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat

- atau organisasi yang mengelolanya.
- d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparaturnegara. Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.
  - e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.
  - f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.
  - g. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga dodnor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.
  - h. Pengadaan suatu perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

### **Kinerja keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efesiensi, rasio keserasian, debt service coverage ratio dan pertumbuhan.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Rahardjo (2011) menyatakan bahwa “keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal (Raharjo: 2011).

### **Kemampuan Keuangan Daerah**

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam

bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

#### **Pengelolaan Penerimaan Daerah**

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah,
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

##### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

#### **Pengelolaan Pengeluaran Daerah**

Dalam Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

##### a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan menambah asset / kekayaan bagi daerah.

##### b. Belanja Investasi / Pembangunan

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset / kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pengeluaran daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain (Nirzawan,2001:77):

##### a. Akuntabilitas



Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas).

b. Value of Money

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money, yaitu:

- 1) Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input). Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan
- 2) Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.
- 3) Efektivitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Atas dasar tersebut, penyusunan

### **Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

#### **a. Rasio Derajat Desentralisasi**

Menurut Halim (2007) Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menggali dan

mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **b. Rasio Ketergantungan Keuangan**

Halim (2001) menunjukkan bahwa *fiscal stress* dapat mempengaruhi APBD suatu daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat. Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ;

$$KK = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **c. Rasio Kemandirian**

Menurut Halim (2001) rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan ;

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Jadi, semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

#### **d. Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan

pendapatan yang dianggarkan (Halim 2008:234).

Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan (GDP) atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun yang dihitung dengan formula: Yustikasari dan Darwato,(2007).

$$Grow = \frac{PDRB t0 - PDRB t1}{PDRB t1} \times 100\%$$

Dimana :

$$Grow = \text{laju pertumbuhan PDRB}$$
$$PDRB t0 = \text{tahun sekarang}$$

$$PDRB t1 = \text{tahun sebelumnya}$$

### **Keterkaitan Hubungan Antara Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektifitas otoda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

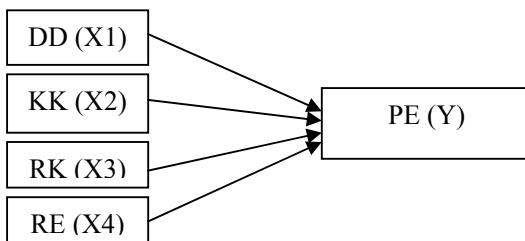
Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Siragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningktan PAD secara langsung.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat

mengindikasikan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Teori ekonomi menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, yang dinyatakan semakin banyak out put nasional, mengindikasikan semakin banyak orang yang bekerja sehingga seharusnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengapa kemiskinan dan pengangguran masih meningkat sementara pertumbuhan ekonomi semakin meningkat (Siregar, 2009).

**Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan yang baik diharapkan dapat digunakan sebagai alternative alat untuk memprediksi kontribusi anggaran pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan penjelasan di atas maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam sebuah model seperti di bawah ini.



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

**Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H<sub>1</sub> : Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data yang telah diolah objek yang diteliti berupa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 dan juga dokumen-dokumen lain yang dihasilkan oleh bagian keuangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari bagian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Banyuwangi, baik berupa keterangan secara lisan maupun keterangan berupa tulisan.

**Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan

keuangan pemerintah daerah Tahun 2004-2011.

2. Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai rasio kinerja keuangan pemerintah daerah seperti: Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan, Rasio kemandirian dan Rasio efektivitas.

### Identifikasi Variabel

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, variabel dalam penelitian ini akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Variable dependent ( Y ) adalah pertumbuhan ekonomi
2. Variable independen ( X ) adalah
  - X<sub>1</sub> : Derajat Desentralisasi
  - X<sub>2</sub> : Ketergantungan Keuangan
  - X<sub>3</sub> : Rasio Kemandirian
  - X<sub>4</sub> : Rasio Efektifitas

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan (GDP) atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun yang dihitung dengan formula:

$$G = \frac{PDRB t0 - PDRB t1}{PDRB t1} \times 100\%$$

Dimana :

G = laju pertumbuhan PDRB  
PDRB t0 = tahun sekarang

PDRB t1 = tahun sebelumnya

2. Derajat desentralisasi  
Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$DD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Ketergantungan Keuangan  
Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$KK = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio kemandirian  
Kemandirian keuangan adalah kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{100\%} \times$$

*Bantuan pusat/provinsi dan pinjaman*

#### 5. Rasio efektivitas

Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{100\%} \times$$

*Target Penerimaan PAD*

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumen atau arsip yang diteliti berdasarkan sumbernya dapat berasal dari data internal, arsip dan catatan orsinil yang diperoleh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis ini merupakan metode untuk menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam kabupaten. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dapat terdistribusi normal atau tidak. model regresi yang baik adalah residual data terdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian untuk pendeteksian normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirno (Imam Ghozali,2007). Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal.

Alat yang digunakan dalam uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut

Jika  $p < 0,05$  maka distribusi data tidak normal.

Jika  $p \geq 0,05$  maka distribusi normal  
Jika data tidak terdistribusi normal, dapat diatasi dengan membuang data yang outlier (data yang menyimpang jauh dari distribusi normal yang terbentuk).

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

(Ghozali, 2009:13)

Di mana:

Y : pertumbuhan ekonomi

a : bilangan konstanta

$b_1$ - $b_3$  : koefisien regresi

$X_1$  : derajat desentralisasi  
 $X_2$  : ketergantungan keuangan  
 $X_3$  : rasio kemandirian  
 $X_4$  : rasio efektifitas  
 $e$  : tingkat kesalahan

### Uji Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji model regresi bukan sebagai pengujian secara simultan. Dasar pengambilan keputusan menggunakan angka signifikansi adalah sebagai berikut :

1). Jika nilai signifikan  $F \geq 0.05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Maka model regresi dikatakan tidak fit atau tidak baik. 2) Jika nilai signifikan  $F < 0.05$ , maka hipotesis satu ( $H_1$ ) diterima. Maka model dapat dikatakan fit atau baik.

### Uji parsial (Uji T)

Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial dimasukkan ke dalam model akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

$H_0$  : Rasio kinerja keuangan (derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektifitas) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### Gambaran Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah daerah kabupaten banyuwangi yang bersumber dari Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Arus Kas dan juga data Pertumbuhan Ekonomi. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu ( times series

) untuk kurun waktu tahun 2004-2011.

Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada organisasi tersebut. Secara umum data - data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan situs [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id) serta informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah.

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah atau dalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2004 hingga 2011 adalah 6.13%. Pertumbuhan ekonomi paling besar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar

9.44%, sedangkan pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 4.04%.

### **Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari derajat desentralisasi selama periode 2004 hingga 2011 adalah 7.47%. Derajat desentralisasi paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 8.00%, sedangkan derajat desentralisasi paling kecil terjadi pada tahun 2007 sebesar 6.61%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio DD selama 9 tahun pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0.00% - 10.00% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Banyuwangi masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menggali dan mengelola masih sangat rendah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih berupaya untuk meningkatkan PADnya, baik dengan menggali baru ataupun dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada.

### **Ketergantungan Keuangan**

Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari ketergantungan keuangan selama periode 2004 hingga 2011 adalah 82.96%. Ketergantungan keuangan paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 101.71%, sedangkan ketergantungan keuangan paling kecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 10.61%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kemampuan keuangan secara umum; peta kemampuan keuangan kabupaten dan kota mengalami pergeseran yang cukup mencolok. Namun demikian, pergeseran ini lebih banyak disebabkan perubahan pertumbuhan PAD yang sangat signifikan. PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan, realitas yang terjadi justru hal yang sebaliknya.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan selama 9 tahun di Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata yang tinggi dan dalam



kategori kemampuan ini bahwa perbandingan pendapatan transfer seperti DAU, DAK lebih besar dengan total penerimaan daerah dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

### **Rasio Kemandirian**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari rasio kemandirian selama periode 2004 hingga 2011 adalah 15.67%. Rasio kemandirian paling besar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 69.12%, sedangkan rasio kemandirian paling kecil terjadi pada tahun 2007 sebesar 7.15%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama 9 tahun pada kabupaten banyuwangi memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih sangat rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan intruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan daripada daerah. Ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan

masih antara 0% - 25%. Rendahnya kontribusi PAD tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan pemerintah terhadap kekayaan daerah yang tidak produktif sehingga tidak dapat menghasilkan PAD yang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap dana alokasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi sangat besar.

### **Rasio Efektifitas**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari rasio efektifitas selama periode 2004 hingga 2011 adalah 114.41%. Rasio efektifitas paling besar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 134.94%, sedangkan rasio efektifitas paling kecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 94.03%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas selama 9 tahun di Kabupaten Banyuwangi sudah termasuk dalam kategori sangat efektif, karena memiliki rata-rata dalam skala lebih dari 100%. Dalam kategori kemampuan ini maka pelaksanaan efektifitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah sudah memberikan hasil guna yang nyata bagi

masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah berhasil mengumpulkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah diatas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Hasil analisis statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov test derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai 0.605 dan signifikan pada nilai 0.858. Tingkat nilai signifikan uji *kolmogorov smirnov* lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa residual model regresi berganda berdistribusi normal. Hal ini berarti  $H_0$  diterima yang berarti data terdistribusi secara normal.

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,980, hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektifitas mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi periode 2004 - 2011 sebesar 98%, sisanya sebesar (100%-98%=2%) dijelaskan faktor lain. Hal ini menjelaskan bahwa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektifitas dapat mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi dan sisanya di pengaruhi oleh fakto-faktor lain,

seperti kemiskinan dan pengangguran.

#### **Uji F (Simultan)**

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji model regresi bukan sebagai pengujian secara simultan. Nilai F hitung = 36,069 < F tabel 6.591 ( $df_1=3$ ,  $df_2=4$ ,  $\alpha = 0.05$ ) dan nilai signifikansi = 0,007 < 0.05, maka diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektifitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi periode 2004-2011.

#### **PEMBAHASAN**

Berikut ini akan dilakukan pembahasan mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan.

##### **1. Derajat desentralisasi (DD)**

Derajat desentralisasi merupakan rasio kinerja keuangan pemerintah untuk menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, nampak bahwa variabel Derajat Desentralisasi (DD) merupakan variabel tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi (DD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai koefisien DD menunjukkan nilai positif 0,094 yang berarti tidak sesuai dengan hubungan landasan teori terhadap pertumbuhan ekonomi

adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Banyuwangi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini sebagai konsekuensi dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, seharusnya pemberian kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur pengeluaran daerah sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal di seimbangkan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya berkaitan dengan kewenangan perpajakan. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi.

Apabila dilihat dari segi penerimaa khususnya di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kondisi penerimaan yang baik hal ini dapat dilihat pada rata-rata penerimaan sebesar 7,47 artinya hal ini

berbanding terbalik dengan kondisi pengeluaran karena sisi pengeluaran, yaitu belanja riil yang telah dilakukan oleh pemerintah, diyakini akan mampu menjelaskan pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan. Selain itu, Malik (2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memungut pajak-pajak strategis dan kemudian mendistribusikannya kepada pemerintah daerah sementara tanggung jawab pengeluaran diberikan kepada pemerintah daerah, maka sisi pengeluaran merupakan indikator desentralisasi fiskal yang lebih baik dibandingkan dengan sisi pendapatan. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagian besar kewenangan untuk memungut pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya memang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah hanya akan mendapatkan penerimaannya melalui transfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

## 2. Ketergantungan Keuangan (KK)

Variabel ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi periode 2004-2011. Hasil ini tidak mendukung hipotesis. Artinya, bahwa proporsi ketergantungan pemerintah pusat dan daerah haruslah memiliki perimbangan jika proporsi ketergantungan keuangan lebih besar di pusat maka ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dapat dilihat dari pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan keuangan (*fiscal stress*) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi

daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Kondisi pemerintah daerah melalui rasio ketergantungan sudah selayaknya mengupayakan penerimaan lebih besar lagi, terutama melalui PAD dan komponen-komponennya. Perlunya intensifikasi pada sisi penerimaan pajak, investor, dan efisiensi serta efektivitas pada sisi pembelanjaan pada kegiatan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

### 3. Rasio Kemandirian

Variabel rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi periode 2004-2011. Hasil ini mendukung hipotesis. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Ukuran ini menguji tingkat kekuatan kemandirin pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam membiayai APBD setiap periode anggaran. Belanja Rutin Non Belanja Pegawai (BRNBP) merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan tidak tersangka serta belanja lain-lain, pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi, atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan uang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total PAD. Semakin besar rasio akan menunjukkan peran pajak sebagai sumber pendapatan daerah akan semakin baik.

Hal ini menunjukkan dalam mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah kabupaten Banyuwangi mampu menggali potensi daerah guna menunjang PAD, dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sebagai upaya peningkatan PAD perlu diambil langkah kebijakan efisiensi didalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ada saving yang dapat dimanfaatkan untuk investasi daerah yang dialokasikan pada badan usaha baik milik daerah sendiri maupun swasta yang mau diajak bekerjasama agar mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah selain dari sektor pajak pajak dan retribusi daerah serta dari transfer pemerintah pusat melalui pengalokasian DAU atau dana perimbangan. Diketahui bahwa pajak dan retribusi merupakan komponen terbesar dalam peningkatan penerimaan PAD. Penerimaan dari hasil usaha daerah belum begitu signifikan, tetapi segi belanja setiap tahun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu mengalokasikan belanja penyertaan modal untuk menunjang peningkatan PAD.

#### 4. Rasio Efektivitas

Variabel rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi periode 2004-2011. Hasil ini mendukung hipotesis. Artinya, kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran

dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Berdasarkan gambaran diatas bahwa penggunaan PAD di Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan potensi ril di daerah, artinya pendapatan yang berasal dari sektor pajak, retribusi, wisata dan lain sebagainya dipergunakan secara efektif guna kepentingan publik, kemudian masih perlunya dilakukan pendataan ulang secara tepat dan akurat mengenai basis pungutan, jumlah obyek pungutan, koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki objek sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk menyesuaikan tarif setiap objek perlu kiranya dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) minimal dua tahun sekali guna menyesuaikan adanya perubahan perekonomian secara makro agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih maksimal.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
2. Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
3. Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
4. Rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatas - keterbatas dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga hasil penelitian ini masih kurang maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah kota lainnya.
2. Penelitian ini masih menggunakan variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penambahan variabel sehingga nantinya dapat mengukur secara komprehensif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banyuwangi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu

- dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat atau propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih berusaha lagi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi.
  3. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan intensif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Banyuwangi seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang tinggi dan lain sebagainya
  4. Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatannya optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Eavaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap pemanfaatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta:Graha Ilmu
2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andreas dan dwi,2010. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo”. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra. Kulon Progo
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada.
- Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, “*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*”. *Jurnal*.
- Karya Setya Azhar, Mhd. 2008. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*”*skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012 . *Standar*

- Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010. Jakarta : Salemba Empat
- Mahsun dkk. 2011 . *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sadono Sukirno, 1994, *Makroekonomi Modern*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Aditya N. P, 2010. *Analisis Ketimpangan antar Wilayah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Erlangga: Jakarta.
- Ulum, Ihyaul (2009). *Audit Sektor Publik*, edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara
- Umar, Husein, 1997. *Riset Akuntansi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wongdesmiwati, 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.
- [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)